

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT..... DINAS PENDAPATAN DAERAH JL.....Telp.....	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : _____ Tanggal jatuh tempo : _____								
I. Berdasarkan Pasal 7 Pasal 10 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :								
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi a. Bunga (Psl. 10(3)) Rp. _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____								
Dengan huruf 								
<u>PERHATIAN</u> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.								
.....,Tahun..... An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Penetapan _____ NIP.								
----- <i>Gunting disini</i> -----								
No.STPD : <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWP : Nama : Alamat : <div style="text-align: right;"> ,Tahun..... Yang Menerima (.....) </div>								